Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta (JKMT)
E-ISSN : 2962-8873
P-ISSN : 2964-6049
+62 811 7404 445 https://siberpublisher.org/ siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jkmt.v4i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 23 Oktober 2026 | **Revised:** 28 Oktober 2026 | **Accepted:** 03 N0vember 2026

Model Bisnis Berkelanjutan dalam Budaya Sasi: Studi Kasus di Jemaat GPM Haruku-Sameth

Regina Yunitha Patikaloba[1], Sri Sulandjari[2].
[1]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, 912025012@student.uksw.edu.
[2]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, sri.sulandjari@uksw.edu.

Corresponding Author: sri.sulandjari@uksw.edu[1]

Abstract: *The local wisdom known as sasi has long served to conserve natural resources in the Maluku Islands however, it has rarely been examined as a sustainable business model, as previous research has primarily focused on its social, ecological, and theological dimensions. This study aims to describe the sustainable business model embedded within the sasi tradition as practiced by the Haruku-Sameth congregation of the Protestant Church of Maluku. Employing a qualitative approach with a descriptive case study design, the research utilizes Soft Systems Methodology as the primary framework, incorporating value chain analysis as a micro-framework for the transformation component. Data were gathered through observation, in-depth interviews with eighteen informants, and documentation, with validity ensured through triangulation. The findings indicate that Sasi Lompa primarily yields ecological benefits, food security, and social solidarity, whereas Sasi Kelapa offers more direct economic potential. Key challenges include overlapping authority between traditional institutions and the church, limited capacity for processing agricultural produce, restricted market access, and the weak bargaining position of farmers. The novelty of this research lies in the integration of these two frameworks, resulting in a dual-path value-addition model, a market-based logic for agricultural produce and a moral economy approach for lompa fish. Regarding the upgrading of the Sasi Kelapa value chain, the establishment of a cooperative is proposed to enhance collective bargaining power and capture value-add locally, this process should be preceded by a financial feasibility study.*

Keyword: *Sustainable Business Model, Sasi, Local Wisdom, Soft Systems Methodology, Value Chain.*

Abstrak: Kearifan lokal sasi telah lama menjaga sumber daya alam di Maluku, tetapi belum banyak dikaji sebagai model bisnis berkelanjutan karena kajian terdahulu lebih menyoroti aspek sosial, ekologis, dan teologis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model bisnis berkelanjutan dalam budaya sasi di Jemaat Gereja Protestan Maluku Haruku-Sameth. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif, dengan Soft Systems Methodology sebagai kerangka utama dan analisis rantai nilai sebagai kerangka mikro pada unsur transformasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap delapan belas informan, dan dokumentasi, kemudian diperiksa keabsahannya dengan teknik triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa Sasi Lompa terutama menghasilkan manfaat ekologis,

ketahanan pangan, dan solidaritas sosial, sedangkan Sasi Kelapa memiliki potensi ekonomi yang bersifat lebih langsung. Tantangan utamanya meliputi perbedaan kewenangan antara lembaga adat dan gereja, kemampuan pengolahan hasil kebun yang terbatas, akses pasar yang sempit, serta lemahnya posisi tawar petani. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan kedua kerangka penelitian tersebut yang menghasilkan model peningkatan nilai tambah berjalur ganda, yakni logika pasar untuk hasil kebun dan ekonomi moral untuk ikan lompa. Pada Upgrading Rantai Nilai Sasi Kelapa, pembentukan koperasi ditujukan untuk meningkatkan daya tawar kolektif dan melokalisir nilai tambah. Untuk itu, perlu didahului kajian kelayakan keuangan.
Kata Kunci: Model Bisnis Berkelanjutan, Sasi, Kearifan Lokal, Soft Systems Methodology, Rantai Nilai.

PENDAHULUAN

Konsep Keberlanjutan (*sustainability*) dalam dunia bisnis semakin menjadi perhatian utama seiring meningkatnya kesadaran akan keterbatasan sumber daya alam dan dampak jangka panjang dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat (Anjanie & Hasyir, 2023). Konsep Bisnis Berkelanjutan tercermin dalam kerangka *Triple Bottom Line* yang menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi bisnis tidak hanya diukur dari laba saja, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungannya (Sakti et al., 2025). Kerangka *Tripple Bottom Line* merupakan model bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang (Kinasih et al., 2022). Model bisnis ini menuntut adanya sistem pengelolaan sumber daya yang dapat memastikan bahwa sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang (Vivi & Harris, 2020).

Jauh sebelum model bisnis berkelanjutan dirumuskan secara akademik, berbagai masyarakat adat di dunia termasuk yang ada di Indonesia khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya, telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Hasriyanti et al., 2023). Kearifan lokal ini umumnya berbentuk aturan atau larangan yang membatasi eksploitasi sumber daya alam pada periode tertentu, sehingga memberi ruang bagi regenerasi alam, menjaga keberlangsungan manfaat ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat penggunanya (Raudhatul & Sarjan, 2025). Sebagaimana ditemukan pada praktik "sasi" oleh masyarakat Maluku, di mana komunitas memahami sasi sebagai kebijaksanaan lokal yang diwujudkan dalam bentuk tradisi untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem dengan cara yang tradisional dan berkelanjutan (Saptenno & Timisela, 2024).

Sasi hadir sebagai respons masyarakat Maluku terhadap kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam mengakses sumber daya alam (Matitaputty, 2021). Di Negeri Haruku, kerusakan mangrove dan terumbu karang akibat pemanfaatan berlebihan, ditambah lemahnya pengawasan atas sumber daya bersama, membuat pihak bermodal dapat mengambil hasil alam secara besar-besaran sementara warga tanpa sarana tertinggal (Vindy & Subroto, 2024). Karena itu, *Kewang* selaku lembaga adat menerapkan "Sasi Lompa" berupa larangan sementara pengambilan sumber daya, pembagian hasil secara merata, dan sanksi bagi pelanggar, sehingga sasi berfungsi secara ekologis dan sosial (Persada, 2018). Kebutuhan akan perlindungan alam juga tampak pada warga jemaat GPM Haruku-Sameth, yang mayoritas petani bermodal terbatas dengan lahan sebagai aset utama untuk komoditas bernilai tinggi seperti kelapa, cengkeh, dan pala demi menunjang ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Namun, jarak kebun yang jauh dari rumah menyulitkan pengawasan dan membuat hasilnya rentan dicuri, sehingga kesejahteraan keluarga terancam (Jamaa, 2016). Oleh sebab itu, gereja sebagai institusi yang

menaungi jemaat menetapkan "Sasi Gereja" melalui keputusan sidang jemaat tahun 2010 untuk melindungi hasil kebun warga, khususnya tanaman kelapa (Sasaoka & Laumonier, 2012).

Pada mulanya sasi gereja dibuat dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi gereja, namun seiring berjalannya waktu berkembang ke arah upaya gereja dalam memperbaiki kondisi ekonomi jemaat (Barus, 2014). Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, dengan adanya praktik sasi, gereja berupaya melindungi petani dari kerugian akibat pencurian hasil kebun, sehingga hasil panen benar-benar dinikmati oleh pemiliknya. Kedua, gereja juga mendorong adanya pola "petik, olah, jual", yaitu jemaat tidak hanya memanen saja, tetapi juga mengolah hasil kebun menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Ketiga, gereja juga berupaya meningkatkan daya tawar kolektif agar petani yang bermodal terbatas tidak bergantung pada harga yang hanya ditentukan oleh pembeli (Riany et al., 2025). Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *upgrading* rantai nilai, yakni meningkatkan nilai tambah dan peran petani pada setiap tahap, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran (Puspito et al., 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa konsep model bisnis berkelanjutan dalam budaya sasi bertumpu pada perpaduan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya alam, sehingga kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan seiring. Namun, pada praktiknya sasi di Haruku hanya kuat secara ekologis dan sosial, tetapi bermasalah secara kelembagaan dan ekonomi (Persada, 2018). Pada praktik Sasi Lompa, penutupan muara sungai, penegakkan aturan, dan penentuan masa panen berdasarkan pengetahuan *nanaku* terbukti menjaga regenerasi ikan, serta membuka akses panen yang adil bagi seluruh warga dengan prioritas (janda, duda, yatim, dan piatu). Akan tetapi, pelaksanaannya terganggu oleh konflik internal antar *Kewang* dan kekosongan jabatan *Kewang Laut* akibat pengunduran diri, sehingga kegiatan Buka Sasi Lompa sempat tertunda sampat saat ini (Kennedy et al., 2019). Sasi Lompa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan kebiasaan remaja, perubahan iklim, dan pencemaran sungai. Hasil panen dari Sasi Lompa juga dilarang dijual hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan warga saja, sehingga dampak ekonominya hanya dirasakan secara tidak langsung melalui sektor jasa (Anisa & Surtikanti, 2024).

Kemudian, pada sasi gereja, penetapan sasi atas kebun (khususnya tanaman kelapa) dinilai lebih dipatuhi karena sanksi spiritualnya. Namun, peralihan kewenangan sasi darat/hutan ini dari otoritas lembaga adat dalam hal ini *Kewang* kepada otoritas gereja menyebabkan munculnya dua sistem kekuasaan, di mana *Kewang* merasa kekuatan adatnya berkurang, sementara pemerintah desa dan saniri negeri, juga masyarakat menganggap sasi gereja lebih efektif (Badaruddin et al., 2021). Secara ekonomi, hasil kebun masih dijual kepada tengkulak di Tulehu tanpa adanya koperasi atau UMKM penampung, sehingga membuat petani hanya menjadi penerima harga saja dan model sasi masih fokus pada subsistensi. Situasi ini menunjukkan terdapat banyak pihak yang terlibat seperti *Kewang*, Pemerintah Desa, Saniri Negeri, Gereja, dan masyarakat dengan kepentingan dan cara pandang yang berbeda tentang tujuan, kewenangan, serta nilai ekonomi dari budaya sasi (Adhuri, 2016). Karena itu, situasi ini tepat untuk dianalisis dengan pendekatan *Soft System Methodology* (SSM) dalam memetakan "dunia nyata" yang problematik sebelum merumuskan sistem aktivitas yang ideal (Aldianto et al., 2020).

Praktik budaya sasi belum banyak dilihat sebagai bisnis berkelanjutan. Sohilait et al., (2024) meneliti sasi ikan lompa di Haruku selaku model pendampingan budaya untuk rekonsiliasi sosial dan keberlanjutan lingkungan secara etnografi, dan menemukan bahwa praktik ini efektif memperkuat keadilan ekologis-sosial melalui nilai solidaritas, gotong royong (*masohi*), dan spiritualitas. Sejalan dengan itu, Anisa & Surtikanti, (2024) mengkaji sasi ikan lompa Desa Haruku melalui studi literatur, dan menemukan bahwa praktik ini efektif mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan serta memperkuat kesadaran ekologis dan kohesi sosial melalui sistem larangan dan waktu panen adat. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa sasi di Haruku telah banyak dikaji dari sisi sosial-ekologis atau normatif-teologis,

namun belum ada yang membingkainya sebagai model bisnis berkelanjutan secara sistematis. Kesenjangan ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana praktik sasi dijadikan sebagai model bisnis berkelanjutan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model bisnis berkelanjutan dalam praktik budaya sasi di Jemaat GPM Haruku-Sameth menggunakan dua pendekatan, yakni *Soft System Methodology* sebagai kerangka utama dan Rantai Nilai sebagai kerangka mikro dalam elemen CATWOE. Dalam penelitian ini juga, akan didukung oleh beberapa teori dasar dan konsep-konsep pendukung yang tentu dapat memperkaya tulisan ini, sebagai berikut:

Bisnis berkelanjutan adalah praktik usaha yang mempertahankan kinerja ekonomi jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan tatanan sosial tempat usaha itu bergantung. Landasan pada teori ini berawal dari konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (WECD, 1987). Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Daly (1990) mempertegasnya dengan prinsip bahwa penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui tidak boleh melebihi laju pertumbuhannya. Dalam dunia korporasi, gagasan ini kemudian dirumuskan sebagai kerangka "*Triple Bottom Line*", di mana kinerja perusahaan dinilai dari tiga dimensi, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial (Elkington, 1997). Dyllick dan Hockerts (2002) menambahkan bahwa keberlanjutan perusahaan harus memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di masa depan. Teori tentang bisnis berkelanjutan tidak hanya berasal pada satu teori tunggal saja, tetapi juga didukung oleh empat fondasi teoritis yang saling melengkapi.

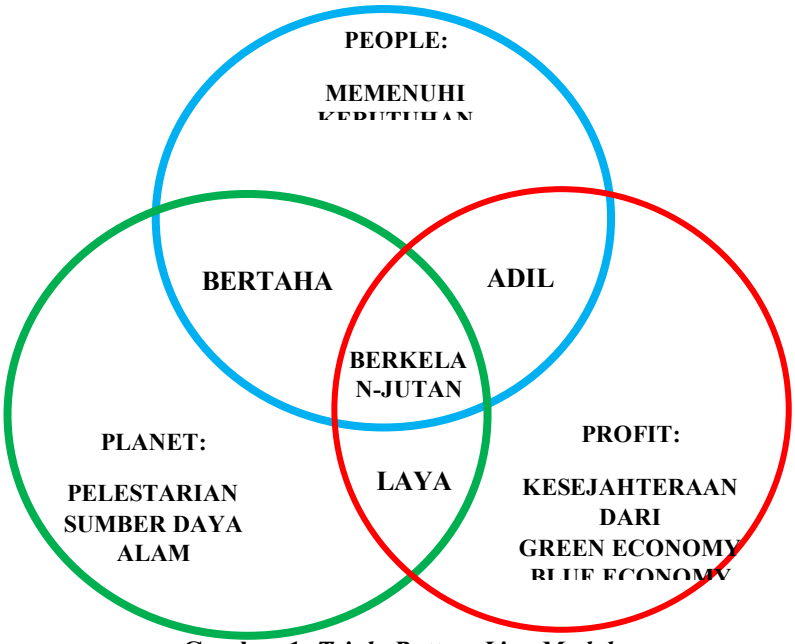
Pertama, teori pemangku kepentingan. Freeman (1984) mengemukakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan semua kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuannya. Donaldson & Preston (1995) mengidentifikasi tugas aspek dari teori ini, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Aspek normatif memandang kepentingan setiap pemangku kepentingan bernilai pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk meraih keuntungan. Mitchell et al., (1997) menunjukkan bahwa prioritas perhatian manajemen ditentukan oleh kekuasaan, legitimasi, dan urgensi klaim dari pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis berkelanjutan, komunitas dan lingkungan dipandang sebagai pemangku kepentingan yang sah, bukan sekadar sebagai masalah luar.

Kedua, teori legitimasi dan institusional. Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai pandangan bahwa tindakan sebuah entitas dianggap layak dan sesuai dengan norma, nilai, serta kepercayaan yang berlaku. Meyer & Rowan (1997) menjelaskan bahwa organisasi mengadopsi praktik tertentu karena adanya tekanan regulasi, norma, dan peniruan. Teori ini juga sejalan dengan Dimaggio & Powell (1983) yang mengingatkan bahaya kepatuhan yang hanya bersifat simbolis, yaitu praktik yang diambil hanya untuk penampilan tanpa mengubah perilaku sebenarnya. Dengan demikian, keberlanjutan yang hanya bergantung pada tekanan dari luar menjadi rentan untuk bersifat simbolik.

Ketiga, perspektif berbasis sumber daya. Barney (1991) menyatakan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan berasal dari sumber daya yang dianggap berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. Hart & Dowell (2011) memperluas pandangan ini melalui *natural-resource-based-view*, yaitu kapabilitas yang berkaitan dengan pencegahan polusi, pengolahan produk, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi sumber keunggulan. Bansal (2005) menekankan bahwa perkembangan keberlanjutan dalam perusahaan dibentuk oleh sumber daya dan kondisi kontekstual perusahaan tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa kelestarian sumber daya adalah bagian penting untuk kelangsungan bisnis, bukan hanya sebagai beban biaya.

Keempat, teori pengelolaan sumber daya bersama dan *stewarship*. Hardin (1968) menjelaskan bahwa sumber daya milik bersama cenderung rusak ketika setiap pengguna hanya

mengejar kepentingan pribadinya. Ostrom (1990) membantah gagasan bahwa kerusakan itu tidak dapat dihindari, karena komunitas mampu mengatur dirinya melalui institusi lokal yang memenuhi prinsip-prinsip desain tertentu, yakni batas yang jelas, aturan yang sesuai dengan kondisi lokal, pengambilan keputusan bersama, pengawasan, sanksi bertahap, penyelasaian konflik, dan pengakuan atas hak untuk berorganisasi. Teori *stewardship* (Davis et al., 1997) melengkapinya dengan asumsi bahwa pengelola dapat bertindak untuk kepentingan bersama. Di sisi lain, teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) mengingatkan bahwa pengelola dapat menyimpang apabila kepentingannya tidak selaras, sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut.



Gambar 1. ***Triple Bottom Line Model***

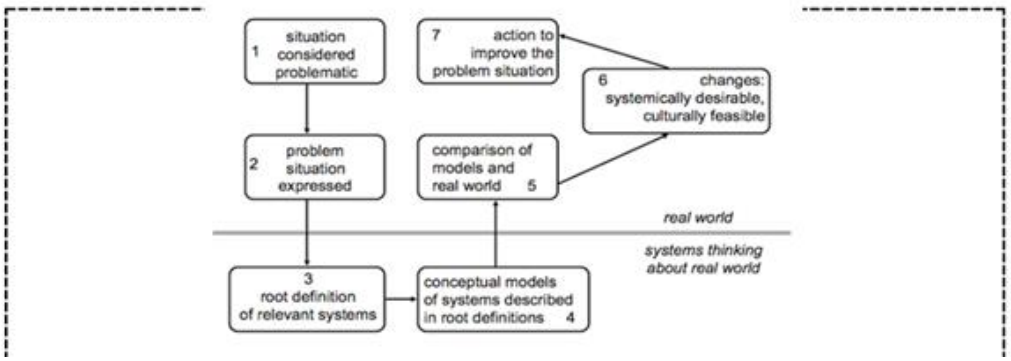
Sasi adalah sistem larangan adat di Maluku yang mengatur kapan, di mana, dan bagaimana sumber daya laut maupun darat dipanen. Proses larangan ini dimulai dengan penutupan sasi dan diakhiri dengan pembukaan sasi, dan dilaksanakan oleh pengawas adat seperti *Kewang*. Sasi pada dasarnya merupakan lembaga sosial pengelolaan sumber daya bersama yang mencakup batasan, aturan, pengawasan, dan sanksi, sehingga secara konseptual sistem ini selaras dengan prinsip yang diungkapkan oleh Ostrom (1990). Tahap jeda panen yang ada dalam sasi sejalan dengan prinsip batas regenerasi yang dijelaskan oleh Daly (1990), dan keputusan bersama dari komunitas memberikan pengakuan sosial sesuai dengan pendapat Suchman (1995).

Dengan demikian, model bisnis berkelanjutan dalam budaya sasi dapat dipahami sebagai model usaha yang menyelaraskan penciptaan dan distribusi nilai ekonomi dengan tata kelola adat yang menetapkan batas pemanfaatan, mekanisme pengawasan, dan keadilan dalam pembagian manfaat pada komunitas. Perbedaannya dengan bisnis konvensional terletak pada penerapan batas ekologis dan tanggung jawab di dalam nilai serta lembaga lokal (Wattimena et al., 2025). Dalam perspektif Meyer & Rowan (1997), hal ini mengurangi risiko kepatuhan yang hanya bersifat formal, karena keteraturan dijaga oleh norma, sanksi sosial, dan keyakinan bersama, bukan hanya oleh tuntutan pelaporan atau regulasi formal. Kerangka teori ini selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur sasi membentuk komponen model bisnis, yaitu proposisi nilai, sumber daya utama, kerjasama dengan lembaga adat, dan struktur pembagian manfaat.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan *Soft System Methodology* (SSM) sebagai kerangka analisis utama. SSM yang dikembangkan oleh Peter Checkland (1990) adalah sebuah pendekatan penelitian berbasis tindakan untuk situasi masalah yang kompleks, tidak terstruktur, dan melibatkan pemangku kepentingan dengan pandangan yang beragam (Checkland & Scholes, 1990). Berbeda dengan metode sistem keras lainnya yang menganggap suatu masalah sudah jelas dan solusinya dapat dioptimalkan secara teknis. SSM mengakui bahwa setiap kelompok memiliki cara pandang dunia yang sah, sehingga prosesnya berupa siklus pembelajaran dari situasi nyata, pemodelan aktivitas yang disasarkan, diskusi perbandingan, sampai pada tindakan (Checkland, 2000).

SSM memandang sasi bukan sekadar rangkaian aktivitas produksi sampai distribusi semata, melainkan sebagai sistem aktivitas manusia (*purposeful activity system*) yang bertujuan mencapai transformasi (*transformation*) tertentu berdasarkan sudut pandang dunia (*weltanschauung*) bersama para pelakunya (*custower, actor, owner*) (Hindle, 2023). Dalam SSM, metode yang digunakan adalah proses yang melibatkan lingkungan dengan hubungan yang relevan antara dunia nyata dan model konseptual yang dihasilkan oleh sistem, dengan harapan menemukan dan mendefinisikan masalah yang memberikan perubahan alternatif (Susanto et al., 2025). Ada tujuh langkah dalam mengimplementasikan SSM, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 2. *Soft System Methodology Stages*
Sumber: (Sandfreni & Adikara, 2020)

Siklus tersebut, kemudian dijabarkan dalam tujuh tahapan yang bersifat literatif, dan bukan linear. Tahap pertama adalah memasuki situasi masalah yang belum terstruktur. Tahap kedua adalah mengungkapkan situasi melalui gambar kaya (*rich picture*. Tahap ketiga merumuskan definisi akar (*root definition*) menggunakan analisis CATWOE, yaitu *customers*, *actors*, *transformation*, *worldview*, *owner*, dan *environmental constraints* (Susanto et al., 2025). Tahap empat adalah membangun model konseptual, yakni model aktivitas ideal yang disusun dari kata kerja pada definisi akar dan diukur dengan kriteria *efficacy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Model ini bukan gambaran dunia nyata, melainkan konstruksi teoritis sehingga tidak ada model yang benar atau salah, hanya menghasilkan model yang relevan (Sandfreni & Adikara, 2020). Tahap kelima, membandingkan model dengan situasi nyata, langkah demi langkah untuk menemukan kesenjangan. Tahap keenam, menyusun perubahan yang diinginkan secara sistemik dan layak menurut budaya. Kemudian, tahap ketujuh mengambil tindakan perbaikan berdasarkan kesepakatan semua pihak (Fountzoula et al., 2026).

Dalam penelitian ini, SSM digunakan sebagai kerangka analisis utama, sedangkan rantai nilai berfungsi sebagai alat analisis mikro pada unsur *Transformation*, yaitu perubahan dari kondisi awal (input) menuju kondisi yang diharapkan (output) (Ramírez-Gutiérrez et al.,

2021). Untuk memahami bagaimana pratik tradisional ini berfungsi sebagai sebuah model bisnis berkelanjutan, studi ini menggunakan metode rantai nilai yang diperkenalkan oleh Porter pada tahun 1985 sebagai dasar analisis. Rantai nilai didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas utama dan pendukung yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup seluruh proses yang membawa sebuah produk dari tahap ide, melalui produksi dan distribusi, hingga sampai ke konsumen akhir. Dalam konteks sasi, kerangka ini dapat dibagi menjadi lima bagian yang saling terkait: (1) Sumber Daya dan Input, yaitu pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam seperti ikan lompa, kelapa, cengkeh, pala, dan keladi selama periode penutupan; (2) Proses Produksi dan Nilai Tambah, yaitu kegiatan panen dan pengolahan hasil menjadi produk yang memiiki nilai ekonomi; (3) Distribusi dan Pemasaran, yaitu cara penyaluran hasil panen kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas; (4) Penerima Manfaat, yaitu anggota jemaat dan masyarakat sekitar yang menikmati hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sistem ini; serta (5) Tata Kelola dan Kelembagaan, yaitu struktur pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga keuangan, gereja, dan pemerintah desa secara bersama-sama. Komponen terakhir ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Porter sebagai infrastruktur perusahaan dan manajemen sumber daya manusia, yang dalam konteks sasi terlihat dari kerja sama antara lembaga adat, otoritas gerejawi, serta kebijakan pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan sistem. Aktivitas utama dalam rantai nilai ini tercermin pada siklus tutup-buka area panen yang berlangsung antara enam hingga dua belas bulan untuk Sasi Lompa dan selama tiga bulan untuk Sasi Kelapa. Sementara, keputusan diambil melalui musyawarah komunitas untuk memastikan distribusi hasil panen secara adil kepada setiap anggota. Dengan demikian, rantai nilai sasi tidak hanya berfokus pada efisiensi produksi, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial sebagai bagian dari kinerja ekonominya.

Adapun informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini guna menunjang validitas dan kredibilitas data penelitian terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Lembaga Adat (*Kewang*), Pemerintah Desa dan Saniri Negeri, Gereja, serta masyarakat/anggota jemaat yang berjumlah 18 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Jemaat GPM Haruku-Sameth yang terletak di pesisir Pulau Haruku, pada Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dan termasuk dalam Klasis Pulau-Pulau Lease. Lokus penelitian ini terdiri dari dua praktik sasi, yakni Sasi Lompa yang dilaksanakan secara khusus di Negeri Haruku dan juga Sasi Kelapa yang dijalankan oleh kedua negeri selaku Warga Jemaat GPM Haruku dan Sameth. Proses penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan terhitung dari bulan Juni-Juli 2026 di Jemaat GPM Haruku-Sameth. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triagulasi data, yaitu menggabungkan berbagai metode dan sumber dalam pengumpulan data melalui perbandingan hasil pengamatan, wawancara, dan studi literatur, serta mengonfirmasi hasil wawancara dengan dokumentasi agar dapat dipercaya (Bennett & Elman, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasi sebagai Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Sasi di Negeri Haruku merupakan kearifan lokal yang menghubungkan pengetahuan ekologis, aturan adat, dan kebersamaan masyarakat. Dalam perspektif *traditional ecological knowledge*, pengetahuan tentang lingkungan terbentuk melalui pengalaman dan diwariskan antargenerasi (Berkes et al., 2014). Hal ini terlihat dalam praktik "*nanaku*", yaitu pengetahuan lokal yang digunakan *Kewang* untuk membaca tanda alam terkait kesiapan ikan Lompa. Narasumber EK selaku Kepala *Kewang* Darat dan Narasumber RR selaku Kepala *Kewang* Laut, menjelaskan bahwa pengetahuan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan sasi. Pengelolaan sasi melibatkan *Kewang*, Raja Negeri, Saniri Negeri,

pemerintah negeri, gereja, dan masyarakat. *Kewang* mengawasi pelaksanaan aturan adat, sedangkan gereja terlibat dalam ritual dan pengelolaan "Sasi Gereja". Perbedaan pandangan mengenai kewenangan Sasi Kelapa menunjukkan perlunya koordinasi antarlembaga. Hal ini sejalan dengan Ostrom (1990), yang menekankan pentingnya aturan lokal, pengawasan, partisipasi, dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya bersama. Selain menjaga lingkungan, "Sasi Lompa" memperkuat ketahanan pangan dan solidaritas sosial melalui pembagian hasil panen, termasuk kepada kelompok rentan. Namun, konflik internal *Kewang*, tantangan regenerasi, dan perbedaan kewenangan masih menjadi kendala. Karena itu, keberlanjutan sasi memerlukan pewarisan pengetahuan lokal dan penguatan koordinasi agar nilai adat, ekologis, dan sosial tetap terjaga ketika "Sasi Kelapa" dikembangkan secara ekonomi.

Sasi dan Potensi Model Bisnis Berkelanjutan Berbasis Komunitas

Kearifan lokal dapat menjadi dasar pengembangan ekonomi komunitas apabila pengelolaannya menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis (Schaltegger et al., 2016). Di Haruku, potensi tersebut terlihat melalui praktik Sasi Lompa dan Sasi Kelapa yang memiliki karakter berbeda. Sasi Lompa lebih berfungsi sebagai sistem pengelolaan sumber daya bersama yang mendukung ketahanan pangan, solidaritas sosial, dan kelestarian lingkungan. *Kewang* Laut (Narasumber RR), menjelaskan bahwa ikan Lompa dapat diambil masyarakat untuk dikonsumsi bersama. Temuan observasi juga menunjukkan bahwa hasil panen dapat diakses masyarakat dan kelompok rentan mendapat prioritas. Meskipun terdapat keterangan Ketua Majelis Jemaat (Narasumber JR) mengenai pembelian ikan oleh pengunjung dari Ambon, data penelitian belum menunjukkan bahwa perdagangan merupakan pola utama pemanfaatan Lompa. Sebaliknya, "Sasi Kelapa" memiliki hubungan lebih langsung dengan ekonomi rumah tangga. Hasil kebun, seperti kelapa, cengkih, dan pala, dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga atau dijual sebagai sumber pendapatan. Namun, keterbatasan modal, pengolahan, transportasi, dan akses pasar menyebabkan nilai tambah yang diterima petani masih terbatas. Dalam perspektif *Triple Bottom Line*, praktik sasi mencakup dimensi *People* melalui ketahanan pangan dan solidaritas, *Planet* melalui perlindungan sumber daya alam, serta *Profit* melalui pendapatan dari hasil kebun (Elkington, 1998). Oleh karena itu, pengembangan model bisnis berkelanjutan perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing sasi: mempertahankan fungsi komunal dan ekologis Sasi Lompa, serta memperkuat pengolahan dan pemasaran hasil Sasi Kelapa agar manfaat ekonomi lebih besar dirasakan masyarakat.

***Rich Picture* dalam Praktik Sasi Lompa dan Sasi Kelapa**

Negeri Haruku atau *Pelasona Nanuroko* terletak di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kehidupan masyarakatnya memperlihatkan hubungan antara tradisi adat, pengelolaan sumber daya alam, dan kehidupan bergereja. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah sasi, yaitu aturan yang membatasi pemanfaatan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini berfokus pada dua bentuk sasi, yaitu Sasi Lompa yang mengatur pemanfaatan ikan di Sungai Learissa Kayeli dan "Sasi Kelapa" yang melindungi hasil tanaman kelapa masyarakat (CRCS UGM, 2022). "Sasi Lompa" merupakan bentuk pengelolaan sumber daya bersama yang melibatkan pengetahuan lokal dan kelembagaan adat. *Kewang* menggunakan Nanaku, yaitu pengetahuan untuk membaca tanda-tanda alam dan memperkirakan kesiapan ikan Lompa sebelum panen (Sokoy, 2022). Pembukaan sasi diawali dengan ritual Panas Sasi, yaitu pembakaran *lobe* atau ikatan pelepah kelapa, pembacaan aturan adat, dan rangkaian kegiatan menuju sungai serta muara. Setelah itu, pendeta memimpin doa sebelum masyarakat melakukan pemanenan (Hanatri, 2019; CRCS UGM, 2022). Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan "Sasi Lompa" menghubungkan pengetahuan ekologis, kewenangan adat, partisipasi masyarakat, dan kehidupan keagamaan. Berdasarkan catatan observasi, hasil panen pada suatu kesempatan dapat mencapai sekitar 40 ton dalam satu hari.

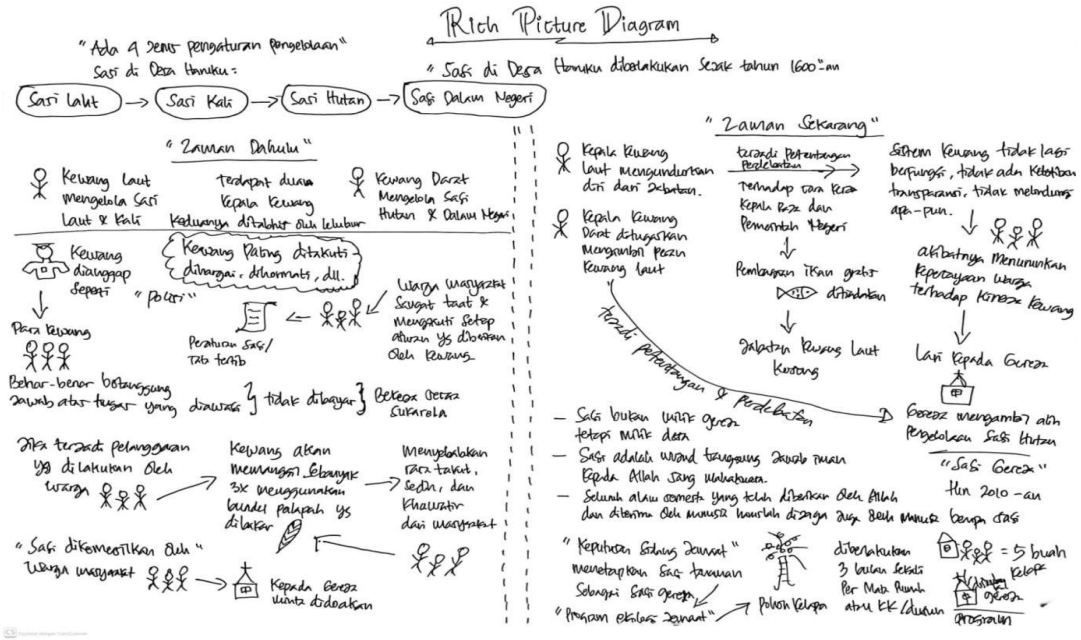
Hasilnya dimanfaatkan secara bersama, dengan kelompok rentan, seperti janda, duda, anak yatim, dan piatu, memperoleh prioritas. Narasumber YK menjelaskan bahwa ikan lompa pada umumnya tidak diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan demikian, data penelitian lebih kuat menunjukkan fungsi Sasi Lompa dalam mendukung ketahanan pangan dan solidaritas sosial daripada menjadikannya sebagai kegiatan komersial utama (Gambar 3).



Gambar 3. *Rich Picture* "Sasi Lompa"

Berbeda dengan "Sasi Lompa", "Sasi Darat" berkaitan langsung dengan perlindungan tanaman dan hasil kebun masyarakat. Pada awalnya, pengelolaan sasi darat berada di bawah kewenangan *Kewang* Darat, yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan adat. Aturan tersebut disusun oleh *Kewang* dan dikoordinasikan dengan lembaga pemerintahan negeri sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, sejumlah informan menyampaikan bahwa pengawasan kebun semakin menghadapi tantangan, termasuk pencurian kelapa dan melemahnya kepatuhan terhadap aturan. Kondisi ini mendorong jemaat mengambil keputusan untuk memberlakukan Sasi Kelapa secara massal dan menyerahkan pengelolaannya kepada gereja sekitar tahun 2010-an. Meski demikian, terdapat perbedaan penjelasan dari informan mengenai proses penyerahan kewenangan tersebut.

Dalam mekanisme "Sasi Kelapa" yang dikelola gereja, pembukaan dan penutupan sasi dilakukan secara berkala. Setiap kepala keluarga memberikan kontribusi lima buah kelapa, yang dalam praktiknya sering diganti dengan uang dan dimasukkan sebagai persembahan untuk pelayanan gereja. Untuk Sasi Kelapa secara perorangan, warga dapat mengajukan permohonan doa dan menggunakan papan sasi yang menurut informan berharga sekitar Rp.20.000-Rp25.000. Perubahan mekanisme ini dinilai membantu menertibkan perlindungan hasil kebun, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai pembagian kewenangan. Sebagian pihak gereja dan pemerintah negeri memandang pengelolaan tersebut sebagai kesepakatan yang dapat diterima, sedangkan kepala *Kewang* Laut menilainya sebagai pelemahan otoritas adat. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan pentingnya kesepakatan dan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan sumber daya bersama (Ostrom, 1990).



Gambar 4. *Rich Picture* "Sasi Kelapa"

Secara keseluruhan, pemetaan *Rich Picture* menunjukkan bahwa praktik sasi di Jemaat GPM Haruku-Sameth melibatkan *Kewang,* Raja Negeri, Saniri Negeri, pemerintah negeri, gereja, dan masyarakat, dengan pembagian peran yang berbeda antara sasi laut dan sasi darat. Selain persoalan kewenangan, pengelolaan sasi menghadapi keterbatasan modal petani, lokasi kebun yang jauh dari permukiman, pengolahan hasil yang masih sederhana, serta ketergantungan pada pengepul untuk pemasaran kopra. Konflik internal *Kewang* dan kekosongan jabatan *Kewang* Laut juga dilaporkan berkaitan dengan tertundanya pembukaan "Sasi Lompa" hampir dua tahun. Selain itu, pada 2024, berdasarkan catatan observasi, tidak ditemukan nener atau bibit ikan lompa di Sungai Learissa Kayeli sehingga sasi tidak dapat dilaksanakan pada periode tersebut. Namun, penyebab kondisi ekologis itu belum dapat dipastikan hanya dari data yang tersedia. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama sasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam, tetapi juga dengan koordinasi kelembagaan, pewarisan pengetahuan lokal, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan model bisnis berkelanjutan perlu mempertahankan fungsi komunal dan ekologis "Sasi Lompa" di satu pihak, meningkatkan nilai tambah hasil "Sasi Kelapa" melalui peningkatan daya tawar komunal. Upaya tersebut perlu dilakukan tanpa mengabaikan kewenangan adat, peran gereja, serta kepentingan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna sumber daya (Gambar 4).

Root Definition dengan Analisis CATWOE Sasi sebagai Model Bisnis Berkelanjutan

Analisis CATWOE dalam *Soft Systems Methodology* (SSM) digunakan sebagai alat untuk memahami dan membantu menemukan inti persoalan dalam praktik sasi selaku sistem sosial yang melibatkan banyak pihak, seperti masyarakat, lembaga adat, gereja, dan lingkungan alam (Checkland & Poulter, 2007). Analisis ini mencakup "Sasi Lompa" dan "Sasi Kelapa" yang memiliki fungsi berbeda. Dalam perspektif model bisnis berkelanjutan, penciptaan nilai tidak hanya berupa keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan (Schaltegger et al., 2016). Sasi Lompa terutama mendukung ketahanan pangan, solidaritas sosial, dan perlindungan ekosistem, sedangkan Sasi Kelapa lebih berkaitan dengan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan dan penjualan hasil kebun. Dalam perspektif model bisnis berkelanjutan, penciptaan nilai tidak terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup manfaat sosial dan lingkungan(Schaltegger et al., 2016). Hal ini relevan karena "Sasi Kelapa" dan "Sasi Lompa" memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. "Sasi Lompa" lebih

menonjolkan perlindungan sumber daya bersama, ketahanan pangan, dan pembagian hasil, sedangkan "Sasi Kelapa" berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penjualan hasil kebun, serta kontribusi bagi pelayan gereja (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis CATWOE Praktik Sasi

Unsur CATWOE	Analisis Berdasarkan Temuan Penelitian Sasi Lompa	Analisis Berdasarkan Temuan Penelitian Sasi Kelapa
***Customers* (C)**	**Masyarakat Haruku dan Sameth**. Masyarakat Haruku menerima manfaat "Sasi Lompa" melalui pangan dan pembagian hasil, termasuk perhatian kepada kelompok rentan.	**Jemaat GPM Haruku-Sameth** menerima manfaat "Sasi Kelapa" dalam bentuk bantuan pengaturan panen kelapa untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui konsumsi, penjualan hasil kebun, dan kontribusi kepada gereja.
***Actors* (A)**	• *Kewang* Laut yang mengawasi sumber daya alam; • Raja Negeri, Saniri Negeri, dan pemerintah negeri yang terlibat dalam tata kelola; • Masyarakat melaksanakan pemanfaatan hasil panen; • Pendeta terlibat terutama dalam doa dan pelaksanaan "Sasi" Lompa	• *Kewang* Darat yang mengawasi sumber daya alam; • Raja Negeri, Saniri Negeri, dan pemerintah negeri yang terlibat dalam tata kelola; • Masyarakat melaksanakan pemanfaatan hasil panen; • Pendeta dan majelis jemaat yang terlibat terutama dalam doa dan pelaksanaan "Sasi" Gereja atau "Sasi" Kelapa.
***Transformation* (T)**	Sumber daya yang berisiko diambil sebelum waktunya dilindungi melalui aturan "Sasi". • Sasi Lompa mengatur masa panen, yang kemudian hasil panen digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Proses ini menghasilkan manfaat pemenuhan kebutuhan pangan, keadilan sosial, perlindungan keamanan ekologis, dan penguatan ekonomi rumah tangga.	Sumber daya yang berisiko diambil sebelum waktunya dilindungi melalui aturan "Sasi". • Sasi Kelapa dan tanaman kebun lainnya mengatur masa panen, yang hasilnya kemudian dikonsumsi, diolah, dan dijual. Proses ini menghasilkan manfaat pemenuhan kebutuhan pangan, keadilan sosial, perlindungan keamanan ekologis, dan penguatan ekonomi rumah tangga.
***Weltanschauung* (W)**	• Sasi dipandang sebagai warisan leluhur dan tanggung jawab bersama untuk menjaga alam.	• Sasi dipandang sebagai warisan leluhur dan tanggung jawab bersama untuk menjaga alam. • Dalam pemahaman ajaran gereja, praktik ini juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap pemeliharaan ciptaan Tuhan, pengendalian diri, kebersamaan, dan kepedulian antargenerasi.
***Owner* (O)**	• Pengelola Lembaga Adat (*Kewang* yang menjalankan pengawasan operasional adat, sedangkan Raja Negeri dan Saniri Negeri memiliki peran dalam tata kelola adat dan pemerintahan).	• Untuk Sasi Kelapa dan Tanaman Kebun Lainnya: Pengelola Gereja (diwakili oleh Pendeta dan Majelis yang mempunyai peran tersendiri dalam "Sasi" Kelapa atau "Sasi" Gereja.
***Environmental Constraints* (E)**	• Kondisi lingkungan alam yang menimbulkan kendala meliputi perubahan kondisi perairan, pencemaran sungai, dan penebangan pohon.	• Kondisi lingkungan alam yang menimbulkan kendala meliputi perubahan kondisi perairan, pencemaran sungai, dan penebangan pohon.

	• Kondisi lingkungan sosial yang menimbulkan kendala, yaitu regenerasi karena perubahan sikap generasi muda terhadap sasi, dan konflik internal lembaga adat.	• Kondisi lingkungan sosial yang menimbulkan kendala, yaitu regenerasi karena perubahan sikap generasi muda terhadap sasi, dan konflik internal lembaga adat. • Perbedaan pandangan mengenai pengelolaan Sasi Kelapa menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga.

Customers, Masyarakat Negeri Haruku dan Negeri Sameth merupakan penerima manfaat utama praktik sasi, dengan bentuk manfaat yang berbeda. Narasumber EL menjelaskan bahwa sasi berfungsi melindungi sumber daya hingga waktu panen, sedangkan Narasumber YT menyampaikan bahwa ikan lompa dikonsumsi atau diasinkan untuk persediaan pangan keluarga. Pembagian hasil Sasi Lompa juga memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Sementara itu, Sasi Kelapa di Sameth memberikan manfaat melalui konsumsi rumah tangga, penjualan hasil kebun, dan kontribusi kepada gereja. Temuan ini menunjukkan bahwa sasi menghasilkan nilai pangan, sosial, dan ekonomi, sejalan dengan konsep model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (Schaltegger et al., 2016).

Actors adalah pelaksanaan sasi melibatkan *Kewang* Darat dan *Kewang* Laut, Raja Negeri, Saniri Negeri, pemerintah negeri, masyarakat, serta gereja. Narasumber DR menjelaskan koordinasi pemerintah negeri, Saniri, dan *Kewang*, sedangkan Narasumber TL, MS, dan YR menekankan pentingnya pengawasan, sosialisasi aturan, dan regenerasi *Kewang*. Narasumber EK dan RR menjelaskan peran *Kewang* dalam menjaga sumber daya. Namun, perbedaan pandangan keduanya mengenai pengelolaan Sasi Kelapa oleh gereja menunjukkan perlunya pembagian kewenangan dan komunikasi yang jelas antarlembaga (Bergvall-Kåreborn et al., 2004).

Transformation pada Sasi Lompa, transformasi berlangsung melalui perlindungan ikan, pemantauan sungai, ritual, pembukaan sasi, pemanenan, dan pembagian hasil. Observasi menunjukkan keterlibatan *Kewang* dan pendeta dalam ritual serta doa sebelum panen, sementara makan *patita* memperkuat kebersamaan masyarakat (CRCS UGM, 2022; OBS-1, OBS-9, OBS-10). Terdapat perbedaan keterangan informan mengenai penjualan ikan lompa sehingga penjualan komersial belum dapat dinyatakan sebagai pola utama. Sementara itu, Sasi Kelapa menghasilkan manfaat melalui konsumsi, penjualan, dan pengolahan hasil. Namun, keterbatasan modal, teknologi, transportasi, dan akses pasar menghambat peningkatan nilai tambah. Kontribusi hasil Sasi Kelapa bersama juga digunakan untuk mendukung pelayanan gereja, bukan secara khusus sebagai modal usaha produktif. Dengan demikian, potensi pengembangan bisnis lebih terbuka pada hasil kebun melalui pengolahan dan pemasaran (Schaltegger et al., 2016).

Weltanschauung, Sasi dipahami sebagai warisan leluhur dan tanggung jawab bersama dalam menjaga alam. Narasumber EL menekankan fungsi perlindungan sumber daya, sedangkan Narasumber YK mengingatkan pentingnya mematuhi aturan dan waktu panen. Narasumber CL menghubungkan sasi dengan pemeliharaan ciptaan Tuhan, sementara Narasumber PM menjelaskannya melalui teologi alam dan teologi kontekstual. Nilai pengendalian diri, kebersamaan, dan kepedulian antargenerasi menjadi dasar pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Nilai tersebut perlu dipertahankan dalam pengembangan model bisnis agar manfaat ekonomi tidak mengabaikan kepentingan sosial dan ekologis (Neesham et al., 2023).

Owner, Kewenangan dalam pelaksanaan sasi di Haruku dan Sameth melibatkan lembaga adat, pemerintah negeri, dan gereja, tetapi peran masing-masing berbeda. Pada Sasi Lompa, lembaga adat, *Kewang*, Raja Negeri, dan Saniri Negeri berperan dalam pengaturan

serta pengawasan pelaksanaan sasi. Sementara itu, pada Sasi Kelapa, gereja melalui pendeta dan majelis jemaat terlibat dalam pengelolaan sasi yang berkaitan dengan kebun dan kontribusi bagi pelayanan gereja. Keterangan kedua Narasumber EK dan RR memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai pembagian kewenangan antara *Kewang* dan gereja. Perbedaan ini menunjukkan perlunya kesepakatan yang jelas agar pengelolaan sasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kewenangan adat maupun peran gereja. Dalam analisis CATWOE, pihak yang disebut *owner* perlu dipahami sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan, mengubah, atau menghentikan sistem, bukan sekadar pihak yang menjalankan kegiatan.

Environmental Constraints, Keberlanjutan sasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan persoalan sosial kelembagaan. Narasumber YT menyampaikan adanya persoalan pencemaran sungai dan penebangan pohon yang dapat mengganggu kondisi lingkungan tempat sumber daya alam berkembang. Selain itu, Narasumber MS mengungkapkan adanya konflik internal dalam lembaga *Kewang* yang menurut keterangannya turut menghambat pelaksanaan sasi. Narasumber RR juga menyoroti tantangan regenerasi *Kewang* dan keterbatasan kompensasi bagi anggota yang menjalankan tugas pengawasan. Dalam pengamatan OBS-6, *nener* tidak ditemukan di Sungai Learissa Kayeli sepanjang periode pengamatan pada 2024 sehingga sasi tidak dilaksanakan pada periode tersebut. Namun, temuan ini belum cukup untuk memastikan penyebab tidak ditemukannya *nener.* Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan sasi bergantung pada kondisi ekologis, kepatuhan terhadap aturan, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pengetahuan antargenerasi.

Berdasarkan analisis CATWOE, sasi di Negeri Haruku dan Negeri Sameth memiliki manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang berbeda sesuai dengan karakter sumber daya dan tata kelolanya. "Sasi Lompa" lebih menonjol sebagai sistem perlindungan sumber daya ikan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan penguatan solidaritas masyarakat. Sebaliknya, Sasi Kelapa memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan melalui pengolahan hasil, pengemasan, dan perluasan akses pasar. Pengembangan tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan adat, peran gereja, kebutuhan rumah tangga, dan perlindungan lingkungan. Karena itu, pengembangan model bisnis berkelanjutan tidak berarti menjadikan seluruh praktik sasi sebagai kegiatan komersial, melainkan memperkuat manfaat ekonomi pada bagian yang memungkinkan tanpa menghilangkan fungsi ekologis dan sosialnya.

Root Definition Sasi Sebagai Model Bisnis Berkelanjutan

Praktik sasi di Negeri Haruku dan Negeri Sameth merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat dan nilai keagamaan untuk menjaga lingkungan, memenuhi kebutuhan pangan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung ekonomi rumah tangga. Keberlanjutannya bergantung pada kondisi ekologis, koordinasi kelembagaan, regenerasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model bisnis perlu mempertahankan fungsi komunal dan ekologis Sasi Lompa, sekaligus meningkatkan nilai tambah Sasi Kelapa melalui pengolahan serta pemasaran hasil tanpa mengabaikan nilai adat dan kepentingan masyarakat.

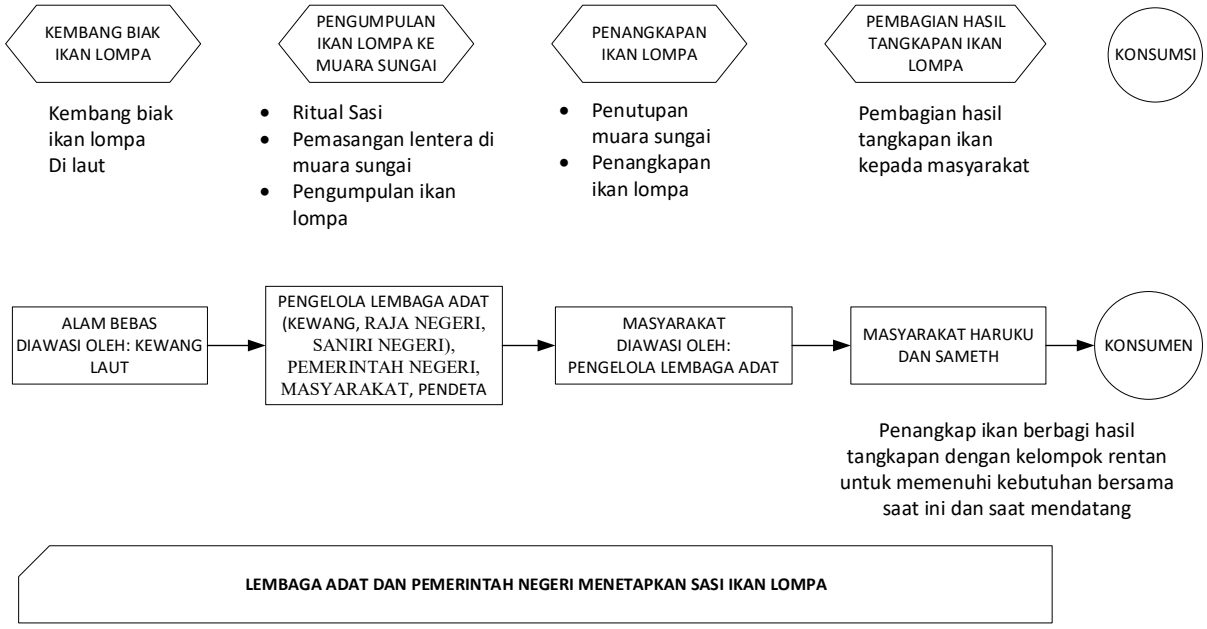
Analisis Rantai Nilai pada Transformasi Sasi

Analisis rantai nilai digunakan untuk memahami tahapan penciptaan nilai, keterlibatan pelaku, dan pembagian manfaat dalam pengelolaan sumber daya (Kaplinsky & Morris, 2001). Analisis rantai nilai berikut ini difokuskan pada Sasi Kelapa, yang melewati transaksi pasar, sehingga dapat diperhitungkan nilai tambahnya. Dalam konteks Jemaat GPM Haruku-Sameth, analisis ini melihat nilai ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis yang dihasilkan melalui praktik sasi. Oleh karena itu, transformasi sasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga perlu mempertahankan kelestarian lingkungan, keadilan pembagian manfaat, dan keberlangsungan aturan adat. "Sasi Lompa" dan "Sasi Kelapa" memiliki rantai nilai yang

berbeda. “Sasi Lompa” berfokus pada perlindungan ikan di Sungai Learissa Kayeli, pemanenan bersama, pemenuhan kebutuhan pangan, dan solidaritas sosial. Sementara itu, “Sasi Kelapa”, berkaitan dengan perlindungan tanaman, pemanenan, pengolahan hasil seperti kopra, dan pemasaran melalui pengumpul. Karena itu, peluang peningkatan nilai tambah lebih langsung terlihat pada hasil kebun, sedangkan pengelolaan “Sasi Lompa” perlu tetap mengutamakan fungsi ekologis dan komunalnya.

Rantai Nilai Sasi Lompa: Nilai Pangan, Sosial dan Ekologis.

Berbeda dengan “Sasi Kelapa”, “Sasi Lompa” tidak terutama berorientasi pada perdagangan. Hasil panen lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga dan dibagikan kepada masyarakat. Karena itu, nilai “Sasi Lompa” tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan pangan, solidaritas sosial, dan perlindungan ekosistem. Rantai nilai “Sasi Lompa” meliputi perlindungan ikan, pengawasan oleh *Kewang*, persiapan dan ritual pembukaan sasi, pemanenan bersama, pembagian hasil, serta pemantauan lingkungan. Penentuan waktu panen mempertimbangkan kondisi ikan dan pengetahuan lokal. Prosesi pembukaan melibatkan pembakaran *lobe*, pembacaan aturan adat, bunyi tifa dan tahuri, serta doa pendeta. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ikan berlangsung dalam kerangka aturan adat, budaya, dan tanggung jawab bersama (Gambar 5).

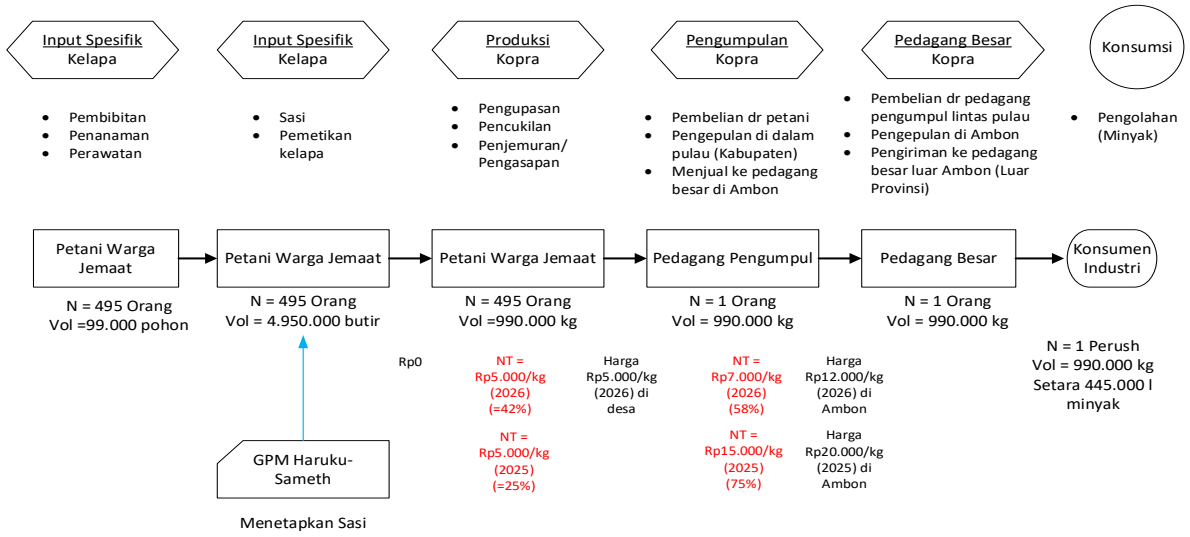


Gambar 5. Peta Rantai Nilai Sasi Ikan Lompa di Negeri Haruku-Sameth

Nilai sosial terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam pemanenan serta prioritas bagi kelompok rentan, seperti lansia, janda, duda, dan anak yatim. Setelah panen, masyarakat juga terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sementara *Kewang* melanjutkan pengawasan terhadap sungai dan kawasan mangrove. Dengan demikian, rantai nilai “Sasi Lompa” menghasilkan manfaat pangan, sosial, budaya, dan ekologis yang saling berkaitan. Namun, keberlanjutannya menghadapi tantangan lingkungan dan kelembagaan. Berdasarkan catatan lapangan, pada 2024 ikan lompa muda yang disebut *nener* tidak ditemukan di Sungai Learissa Kayeli hingga akhir tahun sehingga sasi tidak berlangsung seperti biasanya. Penyebabnya belum dapat dipastikan. Tantangan lain meliputi aktivitas penangkapan ikan oleh pihak luar, perubahan kondisi lingkungan, dan regenerasi *Kewang* Laut. Oleh karena itu, keberlanjutan “Sasi Lompa” perlu didukung pengawasan ekologis, pewarisan pengetahuan lokal, dan penguatan kelembagaan adat tanpa menghilangkan fungsi komunalnya.

Rantai Nilai Sasi Kelapa: Dari Kebun hingga Pasar

Pada "Sasi Kelapa", rantai nilai dimulai dari budidaya pohon kelapa oleh masyarakat, pemanenan hasil, pengolahan, pengumpulan, hingga penjualan kepada pedagang. Kelapa merupakan salah satu komoditas yang dapat diolah menjadi kopra sebelum dipasarkan oleh pedagang pengumpul ke Ambon. Selain kelapa, masyarakat juga mengusahakan cengkeh, pala, dan keladi. Keladi dapat diolah menjadi keripik untuk dijual, termasuk ke pasar di Ambon, sedangkan pala pada kesempatan tertentu diolah menjadi manisan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil kebun tidak hanya terletak pada hasil panen, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengolah produk dan menghubungkannya dengan pasar (Gambar 6).



Gambar 6. Peta Rantai Nilai Sasi Kelapa di Jemaat GPM Haruku-Sameth

Gambar 6 menunjukkan rantai nilai kopra yang meliputi penyediaan input, pengelolaan kebun, pemanenan, pengolahan kelapa menjadi kopra, pengumpulan oleh pedagang lokal, hingga pemasaran kepada pedagang besar dan industri. Petani berperan pada tahap produksi dan pengolahan awal, sedangkan pedagang perantara menghubungkan hasil produksi dengan pasar yang lebih luas. Ketergantungan pada pedagang dan biaya transportasi dapat membatasi akses petani terhadap pasar. Data wawancara menunjukkan bahwa harga kopra di Haruku sekitar Rp5.000/kg, sedangkan Radio DMS melaporkan harga sekitar Rp12.000/kg di tingkat pedagang besar Ambon pada Juli 2026. Perbedaan ini menunjukkan adanya selisih harga antartingkat perdagangan yang disebut nilai tambah, tetapi belum dapat dianggap sebagai keuntungan bersih pedagang karena biaya transportasi, penyimpanan, dan transaksi belum dihitung. Karena itu, peningkatan nilai tambah bagi petani dapat diarahkan pada perbaikan kualitas kopra, akses informasi harga, dan kerja sama pemasaran. Dalam tata kelola "Sasi Kelapa", gereja menerima kontribusi lima buah kelapa dari setiap kepala keluarga atau uang penggantinya sebagai persembahan untuk pelayanan. Dana tersebut tidak secara khusus dialokasikan sebagai modal usaha produktif. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara gereja dan *Kewang* mengenai kewenangan pengelolaan Sasi Kelapa. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai perlu disertai koordinasi antarlembaga agar peningkatan manfaat ekonomi tetap menghormati aturan adat dan peran gereja.

Transformasi Sasi dalam Perspektif Model Bisnis Berkelanjutan

Model bisnis berkelanjutan mengintegrasikan penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan (Schaltegger et al., 2016). Dalam konteks Haruku, kerangka *Triple Bottom Line* yang mencakup *People*, *Planet*, dan *Profit* dapat digunakan untuk memahami manfaat "Sasi Kelapa" dan "Sasi Lompa" (Elkington, 1997). Pada dimensi ekonomi (*Profit*), "Sasi Kelapa", berpotensi dikembangkan melalui peningkatan kualitas kopra, pengolahan hasil kebun, akses

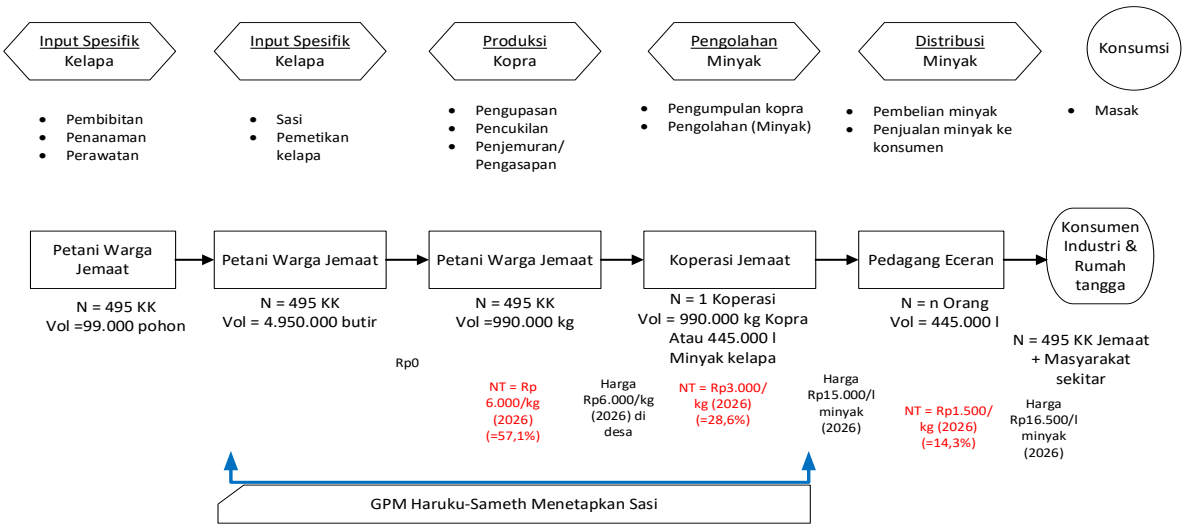
informasi harga, dan kerja sama pemasaran. Pada dimensi sosial (*People*), "Sasi Lompa" mendukung ketahanan pangan, pembagian hasil, dan solidaritas masyarakat, sedangkan "Sasi Kelapa" membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada dimensi lingkungan (*Planet*), keduanya berperan dalam perlindungan sumber daya alam melalui aturan adat, pembatasan pemanfaatan, dan pengawasan oleh *Kewang*. Dengan demikian, transformasi sasi tidak berarti menjadikan seluruh praktiknya sebagai kegiatan komersial. Pengembangan "Sasi Kelapa" dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan posisi tawar petani, sedangkan "Sasi Lompa" perlu mempertahankan fungsi ekologis, pangan, dan sosialnya. Upaya tersebut perlu didukung koordinasi yang lebih jelas antara gereja, *Kewang*, dan lembaga adat agar pengembangan ekonomi tidak mengabaikan kewenangan adat maupun kepentingan masyarakat. Secara praktis, penguatan akses pasar hasil kebun dan perbaikan koordinasi antarlembaga dapat menjadi langkah awal. Dengan pendekatan ini, sasi berpotensi memperkuat manfaat ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan nilai budaya, solidaritas, dan tanggung jawab ekologis yang menjadi dasar keberlangsungannya.

Upgrading Model Sasi: Melalui *Upgrading* Rantai Nilai Sasi Kelapa

Model konseptual upgrading sasi difokuskan pada Sasi Kelapa, yang melewati transaksi pasar, sehingga dapat diperhitungkan nilai tambahnya. Sasi Kelapa dilakukan pada Jemaat GPM Haruku-Sameth disusun dengan menghubungkan mandat teologis pemeliharaan ciptaan, kewenangan adat, pengetahuan lokal Nanaku, interaksi antarlembaga, penciptaan nilai, dan evaluasi berkelanjutan. Berdasarkan kriteria SSM, dari sisi efektif, praktik sasi menunjukkan manfaat dalam melindungi sumber daya dan menertibkan pemanfaatan hasil kebun. Berarti, nilai tambah petani dalam membudidayakan kelapa hingga mengolah kelapa menjadi kopra memperoleh nilai tambah 42% dan pedagang pengumpul yang menjual kopra ke Ambon memperoleh nilai tambah 58% di tahun 2026, sedang di tahun 2025 nilai tambah petani hanya 25% dan pedagang pengumpul 75%. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng rumah tangga di Haruku dan Sameth dipenuhi dengan minyak sawit yang didatangkan dari Ambon dengan harga Rp.20.000,- per liter. Apabila masyarakat lokal dapat mengolah sendiri kopranya menjadi minyak kelapa, maka dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga sekitar Rp.16.500,- per liter. Dari sisi, efektivitas, peningkatan kesejahteraan ekonomi jemaat belum menunjukkan hasil yang optimal dari mekanisme sasi yang sementara berjalan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya peluang untuk *upgrading* rantai nilai dengan melokalisir (menarik) nilai tambah penjualan kopra ke Ambon dan mensubstitusi kebutuhan minyak goreng dari sawit dengan minyak kelapa buatan lokal. Program *upgrading* rantai nilai tersebut harus dihubungkan dengan pengembangan ekonomi jemaat dan program pemberdayaan gereja.

Perubahan yang layak dilakukan dapat dimulai melalui tiga langkah. Pertama, membentuk forum koordinasi antara *Kewang*, gereja, dan Pemerintah Negeri yang difasilitasi Raja dan Saniri Negeri untuk memperjelas kewenangan serta membangun kesepakatan bersama. Kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan kontribusi papan sasi, hasil panen berupa 5 buah kelapa per KK, persembahan uluhasil, persepuluhan, dan memisahkannya dari pencatatan dana usaha milik gereja. Ketiga, membentuk koperasi jemaat untuk menampung kopra dari warga jemaat dan mengolahnya menjadi minyak (Gambar 7). Langkah ini akan memberdayakan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja terutama bagi warga jemaat dalam pengumpulan dan pengolahan minyak serta peningkatan nilai tambah kelapa hasil kebun serta meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal (tidak perlu mendatangkan minyak goreng dari daerah lain). Koperasi jemaat juga dapat mengolah produk turunan lainnya dari kopra dan minyak kelapa. Model ini perlu didahului kajian kelayakan usaha, ketersediaan bahan baku, kebutuhan modal, teknologi pengolahan, standar mutu, akses pasar, dan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dengan demikian, unit usaha tidak langsung

dianggap sebagai solusi yang pasti berhasil, tetapi sebagai alternatif pengembangan yang perlu diuji bersama masyarakat.



Gambar 7. Peta *Upgrading Model* Rantai Nilai Sasi Kelapa di Jemaat GPM Haruku-Sameth

Model hasil *upgrading* ini menyeimbangkan tiga dimensi *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997). Dimensi *profit*, diperkuat melalui peningkatan nilai tambah bagi petani (dari 42% untuk petani menjadi 57,1% untuk petani + 28,6% untuk koperasi jemaat milik petani). Dimensi *people*, tercermin oleh terbukanya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran, kenaikan pendapatan, ketahanan pangan dari sumber daya lokal dan perbaikan status kesehatan. Dimensi *planet*, tampak pada praktik sasi yang menjaga kelestarian kebun kelapa dan ekosistemnya. Penguatan ekonomi ini tidak menggeser nilai adat dan teologis. Ikan lompa tetap non-komersial, sehingga rantai nilai sasi tetap bersifat ganda: satu jalur beroperasi dengan logika pasar dan satu jalur dengan logika ekonomi moral (Scott, 1976). Secara teologis, mandat manusia sebagai gambar Allah (*imago dei*) untuk menjaga sekaligus mengusahakan ciptaan (Buan & Elena, 2023) menjadi dasar agar gereja tidak berhenti pada legitimasi spiritual dan administratif. Kontribusi teoritisnya adalah memadukan SSM, yang menangkap keragaman pandangan dunia, dengan analisis rantai nilai, yang menghitung nilai tambah, dalam komunitas adat-gereja (Porter, 1985; Matitaputty, 2021). Kontribusi praktisnya adalah rancangan unit usaha dan tata kelola bersama yang dapat ditindaklanjuti Jemaat.

KESIMPULAN

Praktik sasi di Masyarakat Negeri Haruku-Sameth dan Jemaat GPM Haruku-Sameth berpotensi dikembangkan sebagai model pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi sebagai model bisnis berkelanjutan. Analisis SSM dan rantai nilai menunjukkan bahwa: "Sasi Lompa", menghasilkan manfaat ekologis berupa pelestarian ikan laut dan solidaritas sosial dalam kontribusi ketahanan dan kesejahteraan pangan. Sedangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan berupa penghematan belanja dapur atau *opportunity cost* dari hasil panen ikan lompa sebagai bahan pangan. "Sasi Kelapa", memiliki potensi ekonomi yang lebih langsung berupa nilai tambah, selain manfaat ekologis dan sosial. Tantangan utama pada praktik "Sasi Kelapa" ini meliputi lemahnya koordinasi antara *Kewang* dan Gereja, keterbatasan kemampuan pengolahan hasil panen, akses pasar, serta posisi tawar petani. Tantangan itu diatasi dengan menawarkan *upgrading* rantai nilai sebagai model pengembangan sasi yang diarahkan pada penguatan koordinasi antar lembaga, dan penciptaan unit bisnis bersama berupa koperasi jemaat. Koperasi jemaat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengolahan kopra untuk mensubtitusi minyak goreng sawit yang diimpor dari daerah lain, melokalisir nilai tambah, serta memperluas akses pasar. Pembentukan unit usaha bersama

atau koperasi perlu didahului kajian kelayakan finansial dengan tetap menjaga nilai adat, fungsi sosial, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini terbatas pada satu studi kasus dan belum menguji kelayakan finansial model yang diusulkan. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji kelayakan usaha dan dampaknya berdasarkan dimensi *Triple Bottom Line*, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

REFERENSI

Adhuri, D. S. (2016). *Selling the sea, fishing for power: A study of conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia* (T. A. N. University (ed.)). ANU E Press.

Aldianto, L., Novani, S., Anggadwita, G., Budi, A. A., & Wirawan, C. (2020). SOFT SYSTEM METHODOLOGY APPROACH: TOURISM CONCEPTUAL MODEL AS THE IDENTITY OF BANDUNG , INDONESIA. *Business: Theory and Practice*, *21*(1), 282–292.

Anisa, Z. A. N., & Surtikanti, H. K. (2024a). Kearifan lokal sasi ikan lompa masyarakat Desa Haruku dalam menjaga kelestarian ekosistem laut : Studi literatur. *SEESDGJ Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*, *1*(2), 119–127.

Anisa, Z. A. N., & Surtikanti, H. K. (2024b). Kearifan lokal sasi ikan lompa masyarakat Desa Haruku dalam menjaga kelestarian ekosistem laut: Studi literatur. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*, *1*(2), 124–135. https://doi.org/10.61511/seesdgj.v1i2.2024.379

Anjanie, R. C., & Hasyir, D. A. (2023). Pengaruh Corporate Environmental Performance dan Environmental Cost terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, *3*(2), 91–96.

Badaruddin, E., Sahusilawane, J. F., & Anidlah, J. (2021). Konservasi Tradisional terhadap Sumberdaya Alam di Kecamatan Leitimur Selatan. *MAKILA: Jurnal Penelitian Kehutanan*, *15*(1), 22–36.

Bansal, P. (2005). "Evolving sustainability: a longitudinal study of corporate sustainable development." *Strategic Management Journal*, *26*(3), 197–218.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, *17*(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Barus, R. N. (2014). "Sasi Adat dan Sasi Gereja di Haruku" Interaksi Gereja dan Adat : Sebuah Pertimbangan Ekologis dan Teologis. *Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta*.

Checkland, P. (2000). Soft systems methodology: A thirty year retrospective. *Systems Research and Behavioral Science*, *17*(1), 11–58. https://doi.org/10.1002/1099-1743(200011)17:1+%3C::AID-SRES374%3E3.0.CO;2-O

Checkland, P. B., & Scholes, J. (1990). *Soft systems methodology in action*. John Wiley & Sons.

Daly. (1990). Toward some operational principles of Sustainable Development. *Ecological Economics*, *2*(1).

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, *22*(1), 20–47.

Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56

Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Concepts, Evidence and Implications. *Academy of Management Review*, *20*, 65–91.

Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Bus. Strat. Environ.*, *11*(1302), 141.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.

Fountzoula, C., Aravossis, K., & Tatsiopoulos, I. (2026). Application of soft system

methodology (SSM) in structuring decision support for evaluation of " green " development programs. *Sustainable Futures*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2026.101813

Freeman, R. E. (1984). *"The Stakeholder Approach Revisited."*

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Jurnal Science*, *162*(3859), 1243–1248.

Hart, S. L., & Dowell, G. (2011). A Natural-Resource-Based View of the Firm : Fifteen Years After. *Journal of Management*, *37*(5), 1464–1479. https://doi.org/10.1177/0149206310390219

Hasriyanti, Handayani, F., Ikhdar, A. A. M., & Syamsuddin, I. (2023). KEARIFAN LOKAL SASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERKELANJUTAN DI KECAMATAN SELARU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT. *Jurnal Environmental Science*, *6*(1), 92–99.

Hindle, G. (2023). Introduction to Soft Systems Methodology. *Journal of Systems Thinking*, *3*(1), 1–13.

Jamaa, L. (2016). MATAKAO SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PENCURIAN DI PULAU AMBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Ihkam*, *11*(1), 39–66.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency Costs and ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Kennedy, P. S. J., Nomleni, A., & Lina, S. (2019). PERANAN BUDAYA ADAT SASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERBATASAN MALUKU BARAT DAYA: Suatu Kajian Kualitatif. *PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA KUALITATIF INDONESIA*, 103–114. https://doi.org/10.33510/slki.2019.103-114

Kinasih, S., Mas, M., Abduh, M., & Pramukti, A. (2022). Pengaruh Kinerja Lingkungan , Biaya Lingkungan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. *Center of Economic Student Journal*, *5*(3), 242–257.

Matitaputty, J. K. (2021). Orientation of Sasi Cultural Values in Maluku. *E3S Web of Conferences*, *3*(17), 1–10. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701027

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1997). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, *83*(2), 340–363.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. (1997). Toward a theory of stakeholer indentification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, *22*(4), 853–895.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Persada, N. P. R. F. M. M. I. S. T. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulaun Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, *41*(59), 6869–6900.

Puspito, D. P., Kusnandar, & Setyowati, N. (2016). ANALISIS RANTAI NILAI UBI KAYU (Manihot esculeta crantz) DI KABUPATEN PATI. *Caraka Tani*, *31*(2), 94–101.

Ramírez-Gutiérrez, A.G., Cardoso-Castro, P.P. & Tejeida-Padilla, R. A. (2021). Methodological Proposal for the Complementarity of the SSM and the VSM for the Analysis of Viability in Organizations. *Syst Pract Action Res*, *34*, 331–357. https://doi.org/10.1007/s11213-020-09536-7

Raudhatul, G., & Sarjan, M. (2025). Menggali Kearifan Lokal : Solusi Berkelanjutan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lambda: Jurnal Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya Lembaga "Bale Literasi,"* *5*(1), 115–126.

Riany, M., Arme, D., Harahap, T., Rosyidah, D. M., & Ashidiqy, A. B. (2025). Pendampingan Penyusunan Strategi Pemasaran Berbasis Komunitas bagi Petani. *Sciences Du Nord Community Service*, *2*(05), 39–45.

Sakti, R. A., Basit, A., Zahri, Y. K., & Prayuda, I. P. S. A. (2025). Analisis Produk Halal Dalam

Ekonomi Syariah Global. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *8*(2), 1568–1582.

Sandfreni, & Adikara, F. (2020). *The Implementation of Soft System Methodology (SSM) for Systems Development in Organizations (Study Case : The Development of Tourism Information System in Palembang City)*. https://doi.org/10.4108/eai.23-11-2019.2301495

Saptenno, M. J., & Timisela, N. R. (2024). Assessing the Role of Local Sasi Practices in Environmental Conservation and Community Economic Empowerment in Maluku, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(4), 1407–1413. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190418

Sasaoka, M., & Laumonier, Y. (2012). Suitability of Local Resource Management Practices Based on Supernatural Enforcement Mechanisms in the Local Social-cultural. *Ecology and Society*, *17*(4).

Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016). Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues. *Organization and Environment*, *29*(1), 3–10. https://doi.org/10.1177/1086026615599806

Sohilait, M., Tampake, T., Lauterboom, M., Agama, M. S., Teologi, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2024). Sasi Ikan Lompa Sebagai Pendekatan Pendampingan Berbasis Budaya Dalam Upaya Rekonsiliasi Dan Keberlanjutan Hidup Bersama Di Pulau Haruku-Maluku. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, *7*(1), 195–208. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JISA/article/view/20665

Suchman, M. C. (1995). MANAGING LEGIMATIACY: STRATEGIC AND INSTITUTIONAL APPROACHES. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571–610.

Susanto, T. T. D., Lusiana, L., Trimiltin, R., & Runiasih, M. (2025). PENERAPAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM) DALAM PENYELESAIAN MASALAH KOMPLEKS DI LEMBAGA PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *10*(2), 462–475.

Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, *15*(2), 078–099. https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432

Vivi, & Harris, I. (2020). Pengaruh inovasi lingkungan dan inovasi layanan pada kinerja bisnis yang berkelanjutan (studi pada perusahaan teknologi di batam). *DeReMa (Development of Research Management): Jurnal Manajemen*, *15*(1).

Wattimena, A. K., Iffatin, I. N., & Anshor, A. M. (2025). Adat Sasi in the Concept of Local Economic Democracy in Maluku. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, *4*(8), 3951–3964. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i8.399

World Commision on Environment and Development (WCED), (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.